



**Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik pada Lembaga Pendidikan
(Studi pada Bakesbangpol Kabupaten Kolaka Timur)**

***The National Unity and Politics Agency's Strategy in Implementing Political Education in Educational Institutions
(Study at Bakesbangpol, East Kolaka Regency)***

Riansyah¹, Nartin², Muhamad Irfan Rama³

Universitas Lakidende Unaaha

Email: nartin@unilaki.ac.id

Article Info

Article history :

Received : 26-07-2026

Revised : 28-07-2026

Accepted : 30-07-2026

Published : 01-08-2026

Abstract

This study aims to determine and analyze the National Unity and Politics Agency's strategy in providing political education at educational institutions in East Kolaka Regency and the factors influencing the National Unity and Politics Agency's strategy in providing political education at educational institutions in East Kolaka Regency. This study uses a qualitative research approach. Informants were selected using purposive sampling. Data collection techniques included observation, interviews, and document studies. Data analysis used qualitative descriptive analysis with an interactive analysis model. The results indicate that the National Unity and Politics Agency's strategy in providing political education at educational institutions in East Kolaka Regency encompasses three (3) dimensions: (1) knowledge as the primary foundation for political education for high school students in 2024, (2) attitude, which is a strategy for providing understanding and awareness in political education for first-time voters, and (3) behavior and actions as a strategy for providing understanding, political awareness, and active participation in exercising their voting rights in general elections. The results of this study reveal the factors influencing the strategy of the National Unity and Politics Agency in organizing political education at educational institutions in East Kolaka Regency, supported by (1) political education facilities, namely the availability of physical facilities such as meeting rooms, libraries, quality speakers, curriculum, and information and communication technology; (2) technical implementation patterns, namely the support of the venue and coordinated activity organizers, both the implementing team and the speakers; (3) budget factors, namely the inability to encourage the optimal implementation of political education in high schools; (4) quality factors, namely the implementing elements have less than optimal educational qualifications.

Keywords: Strategy, Political Education, National Unity Agency.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik pada lembaga pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur dan faktor yang mempengaruhi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik pada lembaga pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Informan penelitian ditetapkan dengan cara purposive sampling. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan studi dokumen. Teknik analisis data menggunakan analisis deskripsi kualitatif dengan model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Badan kesatuan bangsa dan politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik Pada Lembaga Pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur menempuh tiga (3) dimensi: (1) pengetahuan sebagai landasan utama pentingnya dalam



pendidikan politik pada siswa Sekolah Menengah Atas tahun 2024, (2) Sikap yakni menjadi strategi dalam memberikan pemahaman dan kesadaran dalam pendidikan politik bagi pemilih pemula, dan (3) Perilaku dan tindakan sebagai strategi memberikan pemahaman, kesadaran politik, dan partisipasi aktif dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Hasil studi ini mengungkapkan faktor-faktor yang mempengaruhi strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik Pada Lembaga Pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur didukung (1) faktor fasilitas pendidikan politik yakni tersedianya sarana fisik seperti ruangan pertemuan, perpustakaan, kualitas narasumber, kurikulum dan teknologi informasi dan komunikasi, (2) Faktor pola teknis penyelenggaraan, atas dukung tempat dan pengatur kegiatan yang terkoordinasi baik tim pelaksana maupun narasumber, (3) Faktor anggaran yakni belum mampu mendorong terlaksananya pendidikan politik di Sekolah Menengah Atas yang optimal, (4) Faktor kualitas yakni unsur pelaksana memiliki kualifikasi pendidikan belum optimal .

Kata Kunci: Strategi, Pendidikan Politik, Badan Kesatuan Bangsa.

PENDAHULUAN

Pemilihan Umum (Pemilu) menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (yang menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 atas perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemilu dapat diikuti oleh warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat dalam regulasi ini. Pemilu sebagai sarana demokrasi yang dapat terlaksana dengan baik jika dilakukan Pendidikan politik kepada wajib pilih baik dikalangan Masyarakat maupun pada Lembaga Pendidikan khususnya pada siswa SMA/SMK yang telah memenuhi syarat untuk memilih.

Pendidikan politik sebagai suatu proses untuk memberikan pemahaman dan pembelajaran tentang kewajiban, hak, serta tanggung jawab oleh seluruh warga negara untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik menjelaskan bahwa terlaksananya pendidikan politik dengan baik secara optimal dapat meningkatkan tingkat kesadaran masyarakat menjalankan kewajiban dan haknya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Regulasi tersebut secara mendasar yang menjadi sasaran pendidikan politik tersebut ialah partai politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat hingga generasi muda.

Penyelenggaraan Pendidikan politik menjadi tanggung jawab pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten yang bertugas untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi dan Kabupaten berkaitan dengan proses penyelenggaraan kegiatan pendidikan politik adalah sebagai fasilitator, secara umum telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan tupoksi, namun belum bisa terlaksana dengan maksimal dikarenakan adanya beberapa faktor yang menghambat dalam pelaksanaan proses pendidikan politik tersebut.

Pendidikan politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten dan provinsi pada lembaga pendidikan atau Masyarakat menekankan pada strategi pengetahuan, pemahaman dan sikap dan perilaku atau Tindakan. Secara empirik studi yang dilakukan oleh Sa'adah (2025), menunjukkan bahwa strategi Bakesbangpol dalam mendorong pendidikan politik bagi organisasi masyarakat dilakukan melalui tiga aspek yaitu pengetahuan, sikap, dan perilaku/tindakan. Dalam riset tersebut ditemukan adanya kendala yang dihadapi dalam Pendidikan



poliitk yakni minimnya anggaran Pendidikan politik, keterbatasan sumber daya manusia, dan belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait dalam pelaksanaan Pendidikan politik.

Penyelenggaraan pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada masyarakat belum optimal seperti dalam riset yang dilakukan Aziz dkk (2022) menemukan bahwa penyelenggaraan pendidikan politik khususnya bagi warga masyarakat pemilih pemula rata-rata sebagai siswa SMA/SMK atau sederajat belum optimal karena masih rendahnya kesadaran masyarakat akan politik, kurangnya partisipasi yang baik dari masyarakat terkait kegiatan politik.

Pelaksanaan pendidikan politik secara empirik belum optimal sebagaimana riset yang dilakukan Adnyanaesa dan Sutama (2023) bahwa dalam survei yang dilakukan LSI (Lembaga Survei Indonesia) merata-ratakan total partisipasi politik rakyat dalam Pilkada sekitar 60 persen dan rata-rata jumlah Golput mencapai 40 persen. Golput adalah fenomena yang alamiah yang selalu ada pada setiap pemilihan umum. Alasan mendasar yang menyebabkan besarnya jumlah Golput adalah adanya motivasi yang beragam dari para peserta pemilu, yang cenderung pada kepentingan politik semata dengan mengabaikan hal-hal ini seperti pendidikan politik rakyat.

Sehubungan dengan kondisi empirik yang terungkap maka Badan peran Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kolaka Timur sangat dibutuhkan dalam pendidikan politik pada Masyarakat khususnya pada pemilih pemula yang rata rata masih dalam Pendidikan SMA/SMK di Kabupaten Kolaka Timur. Para siswa yang ada di beberapa SMA/SMK di Kolaka Timur pada dasarnya masih membutuhkan adanya sosialisasi dan penyuluhan tentang hak dan kewajiban warga negara menjelang pemilihan umum (Pemilu).

Peran Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kolaka Timur dalam kegiatan pendidikan politik kepada masyarakat adalah memberikan pengetahuan dengan menyampaikan informasi tentang hak-hak politik dan kewajiban politik bagi masyarakat secara umum terutama pada pemilih pemula yang masih minim pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban politik yang dilaksanakan dalam pemilihan umum.

Strategi Bakesbangpol Kabupaten Kolaka Timur dalam Pendidikan politik yakni peran sikap. Pentingnya peran sikap ini dalam Pendidikan politik karena Masyarakat atau para siswa belum memiliki sikap kesadaran politik yang baik dalam setiap pemilu. Strategi lainnya yakni perilaku atau tindakan, sebagai bagian penting dalam Pendidikan politik yang dilakukan dalam rangka mendorong kesadaran politik dan partisipasi aktif dalam pemilu, mengingat masih rendah partisipasi politik khususnya bagi siswa SMA/SMK yang telah cukup umum untuk ikut menyampaikan suara politiknya.

Berdasarkan wawancara awal sebelum penelitian, kepala Bakesbangpol Kabupaten Kolaka Timur menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang turut mempengaruhi peran Bakesbangpol Kabupaten Kolaka Timur dalam menyelenggarakan Pendidikan politik yakni faktor fasilitas pendukung yang tersedia, teknis pelaksanaan, faktor anggaran dan faktor kualitas SDM yang tersedia sebagai unsur pelaksana (wawancara, 3 November 2025).

Berdasarkan riset terdahulu menunjukkan bahwa terdapat fenomena dalam setiap pelaksanaan pemilu sehingga penting adanya pendidikan politik. Kesenjangan yang ditemukan dilapangan bahwa antara idealisme partisipasi politik kaum muda dan realitas di lapangan,



menunjukkan fakta bahwa masih terdapat golput (golongan putih) setiap pelaksanaan pemilu. Hal ini disebabkan minim atau rendahnya literasi politik pemilih pemula di sekolah dan masih terdapat kekeliruan pemahaman siswa mengenai politik praktis.

Fenomena kesenjangan pemahaman siswa tentang politik dan pemilu di Kabupaten Kolaka Timur yakni (a) Pemahaman siswa tentang pemilu masih rendah, siswa menganggap politik sekadar urusan pemilu, bukan sebagai instrumen vital dalam pembuatan kebijakan publik di Kabupaten Kolaka Timur, (2) Minimnya literasi digital, penyebaran informasi hoaks, disinformasi, dan polarisasi di media sosial yang mudah memengaruhi psikologi dan partisipasi politik siswa di Kabupaten Kolaka Timur. (3) Keterbatasan kurikulum, bahwa pendidikan politik di Kabupaten Kolaka Timur sering menjadi materi hafalan mata pelajaran, sehingga kurang menyentuh simulasi partisipasi politik aktif di masyarakat. (4) Kendala birokrasi dan kolaborasi, yakni belum terjalin kerjasama yang baik antara pihak Bakesbangpol dengan Dinas Pendidikan maupun pihak sekolah di Kabupaten Kolaka Timur untuk menyusun program pendidikan politik yang tepat sasaran sebelum pemilu dilaksanakan.

Sehubungan dengan belum optimalnya peran Bakesbangpol Kabupaten Kolaka Timur, hal ini sejalan pendapat Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kolaka Timur dalam wawancara awal bahwa mengingat masih rendahnya kesadaran politik dan partisipasi politik Masyarakat khususnya siswa SMA/SMK di Kabupaten Kolaka Timur maka dibutuhkan strategi Bakesbangpol untuk memberikan kesadaran politik yakni melalui strategi pengetahuan, sikap dan perilaku dan Tindakan. Elemen masyarakat di Kabupaten Kolaka Timur khususnya pada pemilih pemula di lingkup SMA/SMK sederajat masih minim pemahamannya tentang pemilihan umum (Caleg, Kepala Daerah dan Presiden dan wakil presiden), sehingga Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kolaka Timur wajib menyelenggarakan pendidikan politik pada sejumlah SMA/SMK/Sederajat tahun 2024 (wawancara dengan Kepala Bakesbangpol Koltim, September 2025).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif yang menekankan kata-kata daripada kuantifikasi dalam pengumpulan dan analisis data, Dengan demikian penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif, yang bertujuan untuk menganalisis strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik Pada Lembaga Pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur.

Informan Penelitian

Informan penelitian ini sebanyak 8 orang yang ditetapkan untuk menjadi sumber data penelitian. Adapun informan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kolaka Timur terdiri Kepala Bidang (Kabid) Politik Dalam Negeri, Kabid Kewaspadaan Nasional, Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Bangsa, dan Subbid Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi Kemasyarakatan. Selain informan dari Bakesbangpol Kabupaten Kolaka Timur juga terdapat informan dari pihak Kepala Sekolah SMAN Lalolae, SMAN Tirawuta, dan SMAN Ladongi. Informsn penelitian ini ditetapkan secara penunjukkan langsung (purposive sampling) dengan pertimbangan semua informan memiliki kewenangan dan kompetensi dalam memberikan data yang dibutuhkan penulis. Adapun yang menjadi informan kunci (key informan)



dalam penelitian ini adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kolaka Timur, dengan pertimbangan pimpinan yang memiliki kewenangan untuk memberikan informasi/data kepada peneliti.

Jenis dan Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer akan diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara langsung terkait strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik Pada Lembaga Pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur. Selanjutnya penelitian ini mengumpulkan data sekunder dalam penelitian ini akan diperoleh melalui studi dokumen. Jenis data penelitian ini terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif tentang strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik Pada Lembaga Pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur.

Data penelitian kuantitatif adalah data yang diperoleh berupa angka-angka atau data –data jumlah sekolah dan siswa yang pernah peserta dalam menyelenggarakan pendidikan politik Pada Lembaga Pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur, Adapun data penelitian kualitatif adalah data hasil wawancara tentang strategi Bakesbangpol dalam menyelenggarakan pendidikan politik Pada Lembaga Pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur.

Teknik Pengumpulan Data

Data penelitian ini dapat terkumpul melalui 3 (tiga) teknik yaitu:

1. Observasi adalah penulis melakukan pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung pelaksanaan pendidikan politik terkait strategi Bakesbangpol dalam menyelenggarakan pendidikan politik Pada Lembaga Pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur.
2. Wawancara mendalam (In-depth Interview) yaitu penulis melakukan wawancara secara detail melalui informan penelitian fokus pada pertanyaan tentang strategi Bakesbangpol dalam menyelenggarakan pendidikan politik Pada Lembaga Pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur.
3. Studi dokumen, yaitu penulis melakukan studi dokumen dengan mengkaji data-data atau dokumen tertulis, terkait laporan hasil penyelenggaraan pendidikan tahun 2024-2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kolaka Timur.

Teknik Analisis Data

Data penelitian yang telah dikumpulkan penulis tentang strategi Bakesbangpol dalam menyelenggarakan pendidikan politik Pada Lembaga Pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur, maka selanjutnya menurut Miles dan Huberman (Silalahi, 2009 :340-341) akan dianalisis melalui tahapan sebagai berikut: (1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, dan (4) penarikan kesimpulan ataupun verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik Pada Lembaga Pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur

Kebijakan pendidikan politik yang dilakukan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kolaka Timur memiliki beberapa tujuan yaitu untuk membentuk suatu



karakter kepemimpinan pada generasi muda serta membangun peradaban politik yang baik. Selain itu pendidikan politik yang dilakukan oleh Bakesbangpol Kabupaten Kolaka Timur sebagai upaya untuk menumbuhkan partisipasi dari masyarakat atau generasi muda khususnya pada lembaga pendidikan, maka harus diadakan pendidikan politik yang baik dan benar. Karena itu Bakesbangpol Kabupaten Kolaka Timur harus menyusun strategi secara baik agar pendidikan politik dapat berjalan dengan baik khususnya kepada lembaga pendidikan menjelang Pemilu Tahun 2024.

Bakesbangpol Kabupaten Kolaka Timur dalam menyelenggarakan pendidikan politik pada lembaga pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur menjelang Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Kepada Daerah memiliki strategi yang tepat dan benar agar generasi muda yang berada di lembaga pendidikan agar dapat menyerap informasi dengan baik. Secara mendasar strategi adalah suatu langkah yang dilakukan oleh organisasi dan individu dengan berfokus dalam menentukan formulasi dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan, dan pengalokasian sumber daya yang disertai penyusunan cara, upaya dengan tujuan meraih kemenangan.

Hasil penelitian ini difokuskan Strategi Bakesbangpol dalam menyelenggarakan pendidikan politik pada lembaga pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur. Lembaga pendidikan yang maksud adalah lembaga pendidikan formal pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di wilayah Kabupaten Kolaka Timur. Hasil penelitian yang terungkap di lapangan dapat diuraikan sebagai berikut:

Pengetahuan

Dimensi penting yang menjadi salah satu fokus penelitian strategi Bakesbangpol dalam menyelenggarakan pendidikan politik pada lembaga pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur yakni pengetahuan. Fokus penelitian pada strategi Bakesbangpol Kabupaten Kolaka Timur adalah pengetahuan. Esensi dari strategi pengetahuan merupakan strategi paling dasar dalam pendidikan politik untuk membangun kesadaran, literasi, dan partisipasi aktif masyarakat. Dengan memberikan pemahaman dasar mengenai sistem politik, hak, dan kewajiban warga negara, pendidikan politik mampu membentuk pemilih cerdas dan bertanggung jawab, khususnya bagi generasi muda sebagai pemilih pemula.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Bakesbangpol Kabupaten Kolaka Timur dalam menyelenggarakan pendidikan politik pada lembaga pendidikan formal khususnya pada tingkat SMA sederajat yakni pengetahuan belum sesuai harapan. Hal ini sejalan pendapat informan AL yang menyatakan bahwa:

Menjelang pemilu baik presiden dan wapres, pemilu legislatif dan pemilu pada tahun 2024, dari pihak Bakesbangpol telah menjalankan fungsinya untuk melaksanakan pendidikan politik pada organisasi kemasyarakatan dan pendidikan formal seperti SMAN Rate-Rate, Tinondo dan Lalolae khususnya kelas 9. Tujuan kegiatan pendidikan politik adalah untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan dasar pentingnya berpartisipasi dalam pemilu 2024. Dalam sosialisasi peran pemilih pemula dalam politik dan pemilu 2024 lalu secara umum masih minim pengetahuan tentang pemilu dan politik (wawancara, 22 Januari 2026).

Fakta yang terungkap menggambarkan bahwa Bakesbangpol telah melaksanakan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pendidikan politik pada level Pendidikan formal khususnya tingkat



pendidikan SMA atau sederajat, namun ditemukan bahwa rata-rata siswa masih minim pengetahuan makna pemilu dan politik Tujuan yang diharapkan dalam kegiatan pendidikan politik adalah agar siswa memiliki wawasan, pemahaman dan kesadaran politik serta mampu berpartisipasi aktif menjelang pemilu 2024, Hasil penelitian yang terungkap sejalan dengan pendapat salah satu informan AF bahwa:

Dengan adanya sosialisasi dan penyuluhan dari Bakesbangpol Kabupaten Koltim pada SMA, maka para siswa khususnya kelas 9 sebagai pemilih pemula yang masih minim pengetahuannya tentang politik dan pemilu dapat memiliki wawasan yang luas dan berpartisipasi dalam pemilu. Pendidikan politik di tingkat SMA masih sangat minim dilakukan di sekolah sehingga dapat berdampak pada sikap golput dan rendahnya suara dari pemilih pemula yang telah berlalu 2024 (wawancara, 21 Januari 2026)

Berdasarkan pendapat informan maka dapat diketahui bahwa secara mendasar pengetahuan siswa SMAN di Rate-Rate, SMAN Tinondo dan SMAN Lalolae tentang pemilu dan politik masih sangat rendah. Hal ini sejalan dengan pengamatan atau observasi penulis bahwa dalam pelaksanaan sosialisasi di SMA yang dihadiri siswa sebagai pemilih pemula sangat minim yang mampu menjawab dari narasumber ketika ada pertanyaan tentang tujuan pemilu.

Hasil penelitian tentang strategi Bakesbangpol dalam menyelenggarakan pendidikan politik pada lembaga pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur ditinjau dari pengetahuan sejalan dengan studi dokumen bahwa minimnya pengetahuan siswa tentang politik dan pemilu sebagai dampaknya terbatasnya SMA yang dikunjungi Bakesbangpol Kabupaten Kolaka Timur. Dari 11 SMAN dan SMAS hanya 3 sekolah yang menjadi Lokasi penyelenggaraan sosialisasi Pendidikan Politik. Jumlah siswa yang seharusnya mendapatkan Pendidikan politik sebanyak 3.356 namun yang mendapatkan Pendidikan politik hanya 400 siswa (11,92 %) dan sebanyak 2.956 siswa (88,08 %) belum mendapatkan Pendidikan politik dari Bakesbangpol Kabupaten Kolaka Timur. Selanjutnya sebanyak 11 SMKS dengan jumlah siswa 1.361 tidak sempat dikunjungi oleh Bakesbangpol untuk melakukan Pendidikan politik.

Sehubungan dengan hasil wawancara, observasi dan studi dokumen menunjukkan bahwa bahwa strategi pengetahuan dalam penyelenggaraan Pendidikan politik belum mendukung strategi Bakesbangpol untuk meningkatkan kesadaran politik dan pemilu bagi pemilih pemula khususnya bagi SMAN dan Swasta dan SMKN dan swasta di Kabupaten Kolaka Timur. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Mahendra & Sinduwiatmo (2023) bahwa untuk menumbuhkan partisipasi dari masyarakat atau generasi muda, maka harus diadakan pendidikan politik yang baik dan benar. Maka dari itu Bakesbangpol harus menyusun strategi secara baik agar pendidikan politik dapat berjalan dan terlaksana dengan hasil yang cukup baik.

Hasil studi pada Bakesbangpol Kabupaten Kolaka Timur belum mampu meningkatkan kesadaran politik dan pemilu bagi siswa karena minimnya Pendidikan politik melalui sosialisasi di SMA dan SMK di Kabupaten Kolaka Timur, sehingga strategi Bakesbangpol ditinjau dari aspek pengetahuan belum menjadi aspek sytaegi yang mampu mendukung tercapainya Pendidikan politik di Kabupaten Kolaka Timur. Para siswa kurang memhami hak-hak dan kewajiban politiknya menjelang pemilu tahun 2024 saat itu.



Berdasarkan hasil studi maka dapat diketahui bahwa strategi pengetahuan belum dapat berkontribusi optimal dalam pelaksanaan pendidikan politik yang diselenggarakan Bakesbangpol Kabupaten Kolaka Timur dalam rangka meningkatkan kesadaran politik pemilih pemula pada siswa SMA dan SMK di Kabupaten Kolaka Timur, sehingga tujuan utama Pendidikan politik juga tidak tercapai sebagaimana yang diharapkan yakni: (1) membangun pondasi kesadaran politik secara dini. Pengetahuan yang cukup mengenai politik membantu warga negara memahami peran mereka, menumbuhkan kesadaran akan pentingnya demokrasi, dan mendorong partisipasi aktif. (2) sebagai literasi politik karena dengan adanya pengetahuan maka pendidikan politik berfokus pada penyampaian informasi mengenai sistem politik, konstitusi, HAM, dan kebijakan publik agar warga negara tidak buta politik. (3) menjadi strategi untuk pemilih pemula. Khususnya bagi generasi muda/pemilih pemula, pengetahuan politik yang baik (melalui sosialisasi, sekolah, atau media) berperan dalam mengurangi angka golput dan meningkatkan partisipasi, dan (4) sumber pengetahuan politik. Karena itu ada tiga sumber utama pengetahuan politik adalah media berita, pendidikan formal/non-formal, dan pengalaman pribadi.

Sikap

Dalam penelitian tentang strategi Bakesbangpol dalam menyelenggarakan pendidikan politik pada lembaga pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur dapat melalui sikap. Strategi yang digunakan dalam pendidikan politik adalah menekankan sikap. Karena itu sikap, sebagai wujud orientasi mental dan perilaku, merupakan strategi dasar pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol Kabupaten Kolaka Timur untuk membentuk warga negara yang sadar hak/kewajiban, partisipatif, dan demokratis. Dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan, sikap membentuk fondasi perilaku politik yang cerdas, melampaui sekadar pengetahuan teori.

Hasil studi mengungkapkan fakta-fakta lapangan bahwa sikap merupakan salah satu strategi yang digunakan oleh Bakesbangpol Kabupaten Kolaka Timur dalam menyelenggarakan pendidikan politik pada lembaga pendidikan formal khususnya pada tingkat SMA sederajat. Hal ini sejalan pendapat informan EH yang menyatakan bahwa:

Yang terpenting dari kegiatan sosialisasi melalui pendidikan politik menjelang pelaksanaan pemilu baik presiden dan wapres, pemilu legislatif dan pemilu kadatun 2024 adalah sikap. Melalui pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol Kabupaten Kolaka Timur maka para pelajar tingkat pendidikan SMA khususnya kelas 9 dapat mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara, berpartisipasi dan paham pentingnya kesadahan dalam demokrasi atau pemilu (wawancara, 23 Januari 2024).

Fakta yang terungkap menggambarkan bahwa Bakesbangpol telah melaksanakan tugas dan fungsinya menyelenggarakan pendidikan politik pada level Pendidikan formal khususnya tingkat pendidikan SMA atau sederajat. Tujuan yang diharapkan dalam kegiatan pendidikan politik adalah agar siswa memiliki sikap mental yang dalam mengembangkan wawasan kebangsaan dan politiknya, memiliki kesadaran politik dan pemilih pemula mampu berpartisipasi dalam pemilu 2024. Hasil penelitian yang terungkap sejalan dengan pendapat salah satu informan AL bahwa:

Yang kami harapkan dari pendidikan politik di SMA itu adalah adanya perubahan sikap dengan wawasan kebangsaan dan politik yang baik sehingga pada saat pemilu nantinya sudah mengetahui tujuan pemilu dan calon yang layak dipilih. Jadi secara dini kami lakukan



sosialisasi wawasan kebangsaan dan pemilu pada kelas 9 yang sudah cukup umur untuk memilih dalam pemilu (wawancara, 22 Januari 2026)

Dimensi penting dari strategi Bakesbangpol Kabupaten Kolaka Timur adalah yang harus digunakan adalah sikap, Menurut Mahendra & Sinduwiatmo, (2023) bahwa untuk menumbuhkan partisipasi dari masyarakat atau generasi muda, maka harus diadakan pendidikan politik yang baik dan benar. Maka dari itu Bakesbangpol harus menyusun strategi secara baik agar pendidikan politik dapat berjalan. Adapun strategi tersebut antara lain sikap. Pada strategi kedua harus adanya pematangan sikap dari kalangan masyarakat. Startegi ini memerlukan lebih banyak usaha dalam mematangkan sikap suatu individu.

Strategi yang digunakan dalam pendidikan politik adalah menekankan sikap. Karena itu sikap, sebagai wujud orientasi mental dan perilaku, merupakan strategi dasar pendidikan politik yang dilaksanakan oleh Bakesbangpol Kabupaten Kolaka Timur untuk membentuk warga negara yang sadar hak/kewajiban, partisipatif, dan demokratis. Dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan, sikap membentuk fondasi perilaku politik yang cerdas, melampaui sekadar pengetahuan teori. Karena itu poin utama dari dampak pendidikan politik dengan strategi sikap adalah (1) Sikap sebagai landasan utama yang menjadi orientasi khas individu terhadap sistem politik, menentukan bagaimana mereka bereaksi dan berperan di dalamnya (2) Membangun Kesadaran & Perilaku, yakni Pendidikan politik bertujuan mengubah pengetahuan menjadi sikap (attitude) dan perilaku (behavior) politik yang aktif dan bertanggung jawab. (3) Landasan Karakter Demokratis yakni menekankan pada pengembangan karakter seperti kritis, toleran, dan tanggung jawab adalah strategi utama agar pemahaman politik lebih relevan, dan (4) Partisipasi Aktif, yakni Sikap positif mendorong partisipasi dalam pemilihan umum dan kehidupan bermasyarakat, yang merupakan tujuan inti pendidikan politik.

Sikap, sebagai wujud orientasi mental dan perilaku, merupakan strategi dasar pendidikan politik untuk membentuk warga negara yang sadar hak/kewajiban, partisipatif, dan demokratis. Dengan menanamkan nilai-nilai kebangsaan, sikap membentuk fondasi perilaku politik yang cerdas, melampaui sekadar pengetahuan teori.

Perilaku dan Tindakan

Dimensi yang menjadi fokus penelitian strategi Bakesbangpol dalam menyelenggarakan pendidikan politik pada lembaga pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur yakni perilaku dan tindakan. Fokus penelitian pada strategi Bakesbangpol Kabupaten Kolaka Timur adalah perilaku dan tindakan. Esensi dari Perilaku dan tindakan nyata merupakan strategi paling dasar dalam pendidikan politik karena langsung membentuk partisipasi aktif dan kesadaran demokrasi warga negara, melampaui sekadar teori. Tindakan sehari-hari seperti menggunakan hak pilih, kritis terhadap kebijakan, dan terlibat komunitas adalah wujud konkrit pendidikan politik khususnya kepada generasi muda atau para pelajar kelas IX sebagai pemilih pemula.

Hasil penelitian tentang strategi Bakesbangpol dalam menyelenggarakan pendidikan politik pada lembaga pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur ditinjau dari perilaku dan tindakan didukung hasil penelitian yang dilakukan Mahendra & Sinduwiatmo (2023) bahwa untuk menumbuhkan partisipasi dari masyarakat atau generasi muda, maka harus diadakan pendidikan politik yang baik dan benar. Dengan demikian Bakesbangpol Kabupaten Kolaka Timur harus menyusun strategi



secara baik agar pendidikan politik dapat berjalan dan terlaksana dengan hasil yang cukup baik. Strategi Bakesbangpol Kabupaten Kolaka Timur dalam menyelenggarakan pendidikan politik adalah membangun perilaku dan tindakan nyata mendorong partisipasi politik dan demokrasi yang baik.

Hasil penelitian tentang strategi Bakesbangpol dalam menyelenggarakan pendidikan politik pada lembaga pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur ditinjau dari perilaku dan tindakan didukung hasil penelitian yang dilakukan Mahendra & Sinduwiatmo (2023). bahwa untuk menumbuhkan partisipasi dari masyarakat atau generasi muda, maka harus diadakan pendidikan politik yang baik dan benar. Karena itu, Bakesbangpol Kabupaten Koltim harus menyusun strategi secara baik agar pendidikan politik dapat berjalan dengan baik khususnya pada SMA di Kabupaten Koltim. Adapun strategi dari aspek perilaku dan tindakan yakni memberikan pemahaman tentang pentingnya perilaku dan tindakan nyata dalam sistem demokrasi yakni berpartisipasi langsung pemilu tahun 2024.

Berdasarkan studi dokumen yang diperoleh penulis menunjukkan bahwa dari 14 SMAN di Kabupaten Kolaka Timur hanya 4 SMAN (28, 57 %) yang berhasil dijadikan lokasi pendidikan politik dengan jumlah peserta sebanyak 400 orang siswa atau 100 peserta/SMAN dan 10 SMAN tidak dikunjungi (71,43 %).

Hasil penelitian tentang strategi Bakesbangpol dalam menyelenggarakan pendidikan politik pada lembaga pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur sejalan pendapat Handoyo (2011) dalam Huljanna & Ikhsan (2022) bahwa strategi merupakan suatu langkah yang dilakukan oleh organisasi dan individu dengan berfokus dalam menentukan formulasi dan sasaran jangka panjang, penggunaan serangkaian tindakan, dan pengalokasian sumber daya yang disertai penyusunan suatu cara untuk upaya bagaimana tujuan tersebut menghasilkan kemenangan.

Khasanah & Saraswati (2024) menjelaskan bahwa tujuan daripada program Pendidikan Politik oleh Badan Kesbangpol yakni untuk mendorong terselenggaranya peningkatan dan penguatan peran politik bagi masyarakat; memberikan pelayanan pendidikan politik bagi seluruh lapisan elemen masyarakat dan wanita. Program Pendidikan politik oleh badan Kesbangpol adalah salah satu upaya Kesbangpol dalam memberikan pemahaman dan pembelajaran mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab masyarakat untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara dalam demokrasi NKRI. Badan Kesbangpol berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik.

Hasil penelitian tentang strategi Bakesbangpol dalam menyelenggarakan pendidikan politik pada lembaga pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur ditinjau dari perilaku dan tindakan didukung hasil penelitian yang dilakukan Mahendra & Sinduwiatmo, (2023) bahwa penting dilakukan upaya untuk menumbuhkan partisipasi dari masyarakat atau generasi muda, yakni melalui pendidikan politik yang baik dan benar. Maka dari itu Bakesbangpol harus menyusun strategi secara baik agar pendidikan politik dapat berjalan. Adapun strategi tersebut antara lain : (1) Pengetahuan, merupakan strategi paling dasar untuk mendorong pendidikan politik di kalangan masyarakat yang paling mudah untuk dicapai, (2) Sikap. Pada strategi kedua harus adanya pematangan sikap dari kalangan masyarakat. Strategi ini memerlukan lebih banyak usaha dalam mematangkan sikap suatu individu (3) Perilaku dan tindakan. Setelah semua strategi telah dilaksanakan maka yang terakhir adalah



perilaku dan tindakan. Strategi ini umum dilakukan setelah individu mendapatkan pendidikan politik.

Hasil studi ini sejalan pendapat Christanto & Prathama (2025) menjelaskan bahwa pendidikan politik adalah proses yang memungkinkan warga negara untuk memahami dan belajar tentang hak, kewajiban, serta tanggung jawab mereka dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 mengenai Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik, pelaksanaan pendidikan politik yang baik dan optimal dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjalankan kewajiban dan haknya di tengah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Partisipasi dalam politik menjadi salah satu aspek terpenting dalam menjalani kehidupan bernegara secara demokratis. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 Tentang Pedoman Fasilitas Penyelenggaraan Pendidikan Politik bahwa Pendidikan politik adalah proses pembelajaran dan pemahaman tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Christanto & Prathama (2025). Adnyanaesa & Utama (2023) bahwa pendidikan politik ialah suatu proses pemahaman dan pembelajaran tentang kewajiban, hak serta tanggung jawab oleh seluruh warga negara untuk menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Menyelenggarakan Pendidikan Politik Pada Lembaga Pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur

Dalam rangka meningkatkan partisipasi politik, wawasan kebangsaan, demokrasi dan pemilu maka salah satu kebijakan yang ditempuh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kolaka Timur yakni melaksanakan pendidikan politik pada level SMA di menjelang pemilu. Tujuan pendidikan politik yaitu untuk membentuk suatu karakter kepemimpinan pada generasi muda serta membangun peradaban politik yang baik. Selain itu pendidikan politik yang dilakukan oleh Bakesbangpol Kabupaten Kolaka Timur sebagai upaya untuk menumbuhkan partisipasi dari masyarakat atau generasi muda khususnya pada lembaga pendidikan, maka harus diadakan pendidikan politik yang baik dan benar. Karena itu Bakesbangpol Kabupaten Kolaka Timur harus menyusun strategi secara baik agar pendidikan politik dapat berjalan dengan baik khususnya kepada lembaga pendidikan menjelang Pemilu Tahun 2024.

Bakesbangpol Kabupaten Kolaka Timur dalam menyelenggarakan pendidikan politik pada SMA di Kabupaten Kolaka Timur menjelang Pemilu Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, dan Pemilihan Kepada Daerah dapat berhasil didukung faktor fasilitas pendidikan politik meliputi ketersediaan sarana fisik (ruang pertemuan, perpustakaan), anggaran operasional dari APBD/partai, kualitas narasumber, teknologi informasi/media sosial, dan kurikulum materi yang sesuai kebutuhan masyarakat. Namun sebaliknya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Kolaka Timur tidak akan maksimal melaksanakan pendidikan politik jika fasilitas pendidikan politik kurang memadai sehingga faktor yang kurang mendukung kegiatan pendidikan politik yaitu fasilitas yang kurang memadai seperti fasilitas layanan informasi pendidikan politik secara online berupa domain, hosting, aplikasi website, pengelola website, dan lain-lain sejenisnya belum maksimal sehingga pendidikan politik tidak hanya terbatas pada tatap muka namun dapat dilakukan secara online.



Hasil penelitian ini difokuskan faktor-faktor yang mempengaruhi Bakesbangpol dalam menyelenggarakan pendidikan politik pada lembaga pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur. Lembaga pendidikan yang maksud adalah lembaga pendidikan formal pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di wilayah Kabupaten Kolaka Timur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi Badan kesatuan bangsa dan politik dalam menyelenggarakan pendidikan politik Pada Lembaga Pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur pada aspek (1) pengetahuan belum optimal karena Bakesbangpol tidak mampu menyelenggarakan Pendidikan politik melalui sosialisasi pada semua SMA/SMK, sedangkan aspek yang mendukung strategi Bakesbangpol dalam menyelenggarakan Pendidikan politik yakni (2) Sikap, menjadi strategi Bakesbangpol Kolaka Timur dalam mendorong kasadaran sikap mental siswa sebagai pemilih pemula, dan (3) Perilaku dan tindakan sebagai strategi Bakesbangpol Kolaka Timur untuk meningkatkan partisipasi politik siswa dalam pemilu 2024 yang lalu.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi strategi Badan Kesbangpol dalam menyelenggarakan pendidikan politik Pada Lembaga Pendidikan di Kabupaten Kolaka Timur, (1) faktor fasilitas pendidikan politik yakni tersedia masih minim seperti sarana transportasi dan anggaran untuk sosialisasi pada pada SMA/SMK di Kabupaten Kolaka Timur serta teknologi informasi dan komunikasi yang masih minim, (2) Faktor pola teknis penyelenggaraan adalah pendidikan politik pada SMAN di Kabupaten Kolaka Timur dapat terlaksana atas dukung tempat dan pengatur kegiatan yang terkoordinasi baik tim pelaksana maupun narasumber pada Bakesbangpol Koltim (3) Faktor anggaran yakni belum mampu mendorong terlaksananya pendidikan politik pada seluruh SMA/SMK di Kabupaten Kolaka Timur karena minimnya anggaran. (4) Faktor kualitas unsur pelaksana adalah pada dasarnya belum optimal karena keterbatasan sumber kualifikasi pendidikan kualitas yang masih rendah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adnyanaesa, P. B. & Sutama, I. W. (2023). Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda, *Jurnal Dikemas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, Dikemas. 7 (1), 23-27
- Aljunza, M.S. et al. "Aplikasi It Support Work Orders Berbasis Web Dalam Rangka Menuju Sidoarjo Smart City." *Infotek : Jurnal Informatika dan Teknologi*, 7 (1)
- Amalia, Nadila Mustika & Prathama, Ananta (2025) Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pelayanan Perizinan Permohonan Rekomendasi Penelitian Di Kabupaten Sidoarjo, *Jurnal Administrasi Publik dan Pemerintahan STISIP Imam Bonjol (SIMBOL) : Vol. 4, No. 1 (Januari) 2025 DOI : <https://doi.org/10.55850/simbol.v2i1> | website : <http://ejournal.stisipimambonjol.ac.id>*
- Asparill, Teguh Ahmad (2022) Pemerintahan Daerah Dan Fasilitas Pendidikan Politik: Peluang Dan Tantangan Badan Kesatuan Bangsa, Politik Dan Perlindungan Masyarakat, *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 1 (2), 2022: 147-171,
- Aziz, M. A., Insan, V. W., Lestari, D. A., Rosa, K. D., Prasetyo, I. N., Fauzan, R. H., Achmad, F. U., Taufan, M. A. (2022) Upaya Badan Kesbangpol Kota Bandung Dalam Penyelenggaraan



- Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 1 Juni 2022
DOI: <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2885>
- Christanto, S. A. & Prathama, A. (2025) Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Kesadaran Politik di Kabupaten Sidoarjo. Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jawa Timur, INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research, Volume 5 (2), 397-405, website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Devi Nurhayati, Winarno, Muhammad Hendri Nuryadi (2022) Peran Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Perempuan Melalui Pendidikan Politik Di Kabupaten Sukoharjo, PKn Progresif, Vol. 16 No. 1 Juni 2021
- Fernanda, A. (2022). "Pengaruh Pendidikan Politik terhadap Tingkat Pemahaman Pemilih Pemula (Studi Pada Program Pendidikan Pemilu Badan Kesbangpol Kota Bekasi Tahun 2020)." Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.
- Huljanna, Y. M. & Ikhsan (2022) Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Barat Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Kecamatan Johan Pahlawan, Independen-Jurnal Politik Indonesia dan Global, 3(2), 1-12, Website: <http://jurnal.umj.ac.id/index.php/independen>
- Ikhsan, M. (2025) Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda Di Kota Pekanbaru,
- Khasanah, F. U. & Saraswati, A. P. (2024), Efektivitas Program Pendidikan Politik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Jawa Tengah dalam Menyambut Pemilu Serentak 2024, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Juli 2024, 10 (13), 248-254, DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.12747248>
- Mahendra & Sinduwiatmo. (2023) Media Relation Strategy of DPRD Sidoarjo in the Building Image. DPRD Sidoarjo.
- Muhamad Abdul Aziz, Vania Widhia Insan, Dyan Ayu Lestari, Kemala Dwi Rosa, Ilham Nur Prasetyo, Rifki Hidayat Fauzan, Faiz Ubaidillah Achmad, Muhammad Ali & Taufan, (2022) Upaya Badan Kesbangpol Kota Bandung Dalam Penyelenggaraan Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Jurnal Kewarganegaraan Vol. 6 No. 1 Juni 2022
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010, tentang Pedoman Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik.
- Peraturan Daerah Nomor 42 Tahun 2014 Tentang Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Kolaka Timur
- Sa'adah, D. I. (2025) Strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Sidoarjo Dalam Mendorong Pendidikan Politik Bagi Organisasi Masyarakat, Polistaat, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 8 (1), 49-58
- Sugiyono, 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung, Alfabeta
- Togatorop, Jonathan, (2023) Peranan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Pembinaan Partai Politik (Studi Pada: Partai Keadilan Dan Persatuan Indonesia (PKPI) Di Kabupaten Asahan), Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu politik Universitas Medan Area, Medan
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 (yang menetapkan Perpu Nomor 1 Tahun 2022 atas perubahan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan



Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Peran Camat Cidadak Dalam Mengkoordinasikan Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Dengan Adanya Cafe Bucharest Di Kota Bandung. *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. [https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case a7e576e1b6bf](https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf)

Willymartin, A., Kushartono, T. & Yamardi (2025 Peran Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Organisasi Masyarakat Di Kota Bandung Vol 2 No 2 (2025): *Praxis Idealis: Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan* / DOI: <https://doi.org/10.36859/jp.v2i2.3291>